

Judul : Senayan minta BMKG petakan jalur gempa
Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Mitigasi Bencana Senayan Minta BMKG Petakan Jalur Gempa

SENAYAN meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan daerah-daerah yang dilewati jalur gempa yang ada di Indonesia. Hal ini untuk meminimalisir dampak bencana, menyusul kejadian di Cianjur, Jawa Barat (Jabar), dengan Magnitudo 5,6.

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, BMKG perlu mengantisipasi siklus 20 tahun gempa serupa di Cianjur, Jabar.

"Setelah BMKG memetakan wilayah rawan gempa, semua pihak bisa lebih memperhatikan dampaknya," ujar Lazarus di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Lazarus mengatakan, Pemerintah juga nantinya akan memberi *road map* kepada masyarakat yang ada di jalur gempa. Sehingga ketika mereka akan membangun rumah, harus ada sisi-sisi teknis yang harus dipertimbangkan.

Dengan adanya pemetaan jalur gempa, Komisi V DPR bisa membahas siasat menanganinya gempa dengan kementerian terkait. Seperti, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah menyiapkan konstruksi tahan gempa dan lainnya.

Lazarus mengingatkan, teknologi bangunan tahan gempa sudah ada sejak lama. Bila melihat kejadian di Cianjur, rumah yang roboh-roboh itu memang rumah yang tidak memenuhi

standar ketahanan gempa.

"Kalau rumah yang kokoh cenderung masih bisa bertahan dengan guncangan gempa," ucapnya.

Senada, anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama meminta Pemerintah menyediakan rumah tahan gempa di berbagai wilayah di Indonesia. Ini melihat banyaknya bangunan roboh dan korban jiwa yang timbul akibat gempa Cianjur.

"Kita minta Kementerian PUPR menyediakan contoh rumah tahan gempa di Cianjur dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Agar, mereka menyesuaikan rumah eksisting menjadi rumah tahan gempa," saran Suryadi.

Dia bilang, bantuan uang dari Pemerintah bisa untuk membangun rumah tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726-2019. Perlu juga diangkat tenaga penyuluh bangunan, mengingat Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap desa-desa rawan bencana. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, dari sekitar 81 ribu desa di Indonesia, baru 9.956 desa yang telah dilengkapi perlengkapan keselamatan. Lalu, 6.747 desa telah dilengkapi rambu-rambu dan jalur evakuasi. ■ TIF